



---

## Analisis Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar

Syofia Alkhaira<sup>1\*</sup>, Ghea Aina Khairunisa<sup>2</sup>, Buzarmi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Adzkia, Padang, Indonesia

E-mail: [syofiaalkhaira@gmail.com](mailto:syofiaalkhaira@gmail.com)

\*Corresponding author

---

### INFO ARTIKEL

---

Diterima: 1 Juli 2024

Disetujui: 11 Juli 2024

Dipublish: 12 Juli 2024

---

#### *Kata Kunci*

Evaluasi

Kebijakan

Pendidikan Dasar

### ABSTRAK

---

Evaluasi kebijakan pendidikan dasar penting dilakukan untuk memahami efektivitas kebijakan yang diimplementasikan dalam meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan untuk semua anak. Proses evaluasi ini melibatkan pengumpulan data yang komprehensif, termasuk data kuantitatif dan kualitatif, dari berbagai sumber seperti tes akademik, statistik sekolah, wawancara dengan para pemangku kepentingan, dan analisis dokumen kebijakan. Metode evaluasi yang digunakan meliputi analisis statistik untuk mengukur pencapaian akademik, wawancara mendalam untuk memahami persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan, serta studi kasus untuk mengeksplorasi dampak kebijakan secara kontekstual. Hasil evaluasi menunjukkan adanya kemajuan di beberapa bidang, seperti peningkatan tingkat kelulusan, peningkatan aksesibilitas pendidikan, dan peningkatan prestasi akademik mahasiswa. Namun, evaluasi ini juga mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, kesenjangan akses bagi kelompok marjinal, dan kendala infrastruktur pendidikan. Implikasi dari evaluasi ini mencakup rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, seperti meningkatkan alokasi sumber daya, meningkatkan pelatihan guru, dan mengadaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam. Diharapkan rekomendasi-rekomendasi ini akan mendukung perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan dasar, memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama dan pendidikan yang berkualitas. Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan pendidikan dasar ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian, tantangan, dan arah ke depan dalam upaya meningkatkan sistem pendidikan untuk generasi mendatang.

---

---

## PENDAHULUAN

Evaluasi kebijakan pendidikan dasar yakni sebuah aktivitas agar mengetahui sebuah kebijakan pendidikan itu betul-betul akan sesuai terhadap kriteria yang sudah ditentukan dan bisa memunculkan dampak nyata kepada khalayak sesuai terhadap yang diharapkan. Didalam prosesnya yang musti dijalankan pada implementasi analisis kebijakan pendidikan, supaya bisa dipahami apakah kebijakan itu bisa terselenggara secara baik atau sebaliknya, dengan adanya perubahan atau perbaikan. Dan bisa mengetahui kekurangan atau kelebihan untuk kebijakan pendidikan itu apabila diterapkan. Semua dapat melihat dampak yang dimunculkan dari kebijakan pendidikan tersebut, akan menghadirkan manfaat atau memunculkan kegaduhan, kerugian serta lainnya. Pada tahapan manajemen sendiri, proses evaluasi adalah fase akhir dimana suatu proses penyusunan kebijakan yang bisa menciptakan rekomendasi supaya bisa menyempurnakan suatu kebijakan pendidikan itu. Tentang sesuatu yang telah terjadi akibat dari pilihan serta penerapan kebijakan pendidikan dasar itu. Bila dinilai perlu maka perubahan kepada kebijakan pendidikan harus dijalankan dengan penilaian (evaluasi). Dengan mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah instrumen yang terpenting didalam sebuah kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan yang telah berjalan ataupun yang belum berjalan juga telah berhasil atau tidak sesuai terhadap yang dikehendaki atau tidak (Supandi, 1988). Kebijakan pendidikan merupakan unsur akan kebijakan publik yang tidak dapat terlepas dengan sendirinya tanpa adanya sebuah evaluasi.

Evaluasi kebijakan pendidikan dasar yang dijalankan dalam menilai keefektifan serta wujud pertanggungjawabkan pada pelaksanaan pendidikan pada publik untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sudah ditentukan guna mengukur tingkat perbedaan diantara harapan serta realita. Evaluasi kebijakan pendidikan supaya dapat jadi sarana dalam menghimpun serta mengelola informasi tentang program atau pelayanan pendidikan, untuk menetapkan saran untuk perbaikan yang dibutuhkan guna penerapan kebijakan pendidikan terselenggara efektif sesuai terhadap standar yang ditentukan (Hasbullah:2015).

Biasanya evaluasi kebijakan pendidikan dasar adalah sebuah proses atau kegiatan yang dijalankan dengan berurutan, serta merupakan tahapan terakhir didalam proses analisis kebijakan (Islamy, 1994: Winarno, 2008). Akan tetapi, beberapa pakar

menyatakan evaluasi kebijakan pendidikan bukan adalah fase terakhir akan proses kebijakan, dapat dijalankan ditengah proses analisis, berdasarkan pertimbangan program kebijakan condong pada suatu kegagalan atau kurang pada kesesuaian terhadap tujuan yang dikehendaki. Sebab, kebijakan sering terjadi kegagalan dalam meraih maksud atau tujuan yang sudah ditentukan. Sistem Pendidikan Nasional adalah sebuah sistem yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Seiring tuntutan pembaharuan pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan. Semenjak tahun 2003 telah diganti dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang disahkan pada tanggal 11 Juni 2003. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat menyebutkan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa,” dalam hal ini bangsa mencakup seluruh warga negara Indonesia baik warga yang belajar di sekolah-sekolah negeri, maupun yang belajar di sekolah swasta dalam hal ini kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik (Dewi, 2016). Upaya “meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah, ini berarti pemunculan kebijakan itu harus dilandaskan pada orientasi tujuan yang kuat” (Sholeh, 2005). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan tidak hanya berbentuk undang-undang saja. Persoalan penting yang perlu disorot adalah apakah kebijakan pendidikan itu dapat diimplementasikan dengan baik juga menghasilkan output yang diharapkan, bahwa hasil akhir dari semua kebijakan itu sebagaimana yang telah ditentukan dalam tujuan dari pendidikan itu.

Evaluasi kebijakan pendidikan dasar merupakan upaya komprehensif untuk mengukur, mengevaluasi, dan menginterpretasi dampak kebijakan terhadap sistem pendidikan suatu negara. Dalam konteks global yang terus berubah, kebijakan pendidikan dasar berperan sentral dalam membentuk landasan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diperlukan bagi perkembangan individu dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi kebijakan pendidikan dasar melibatkan serangkaian langkah metodologis yang kompleks, dimulai dari pengumpulan data yang teliti dan analisis mendalam terhadap berbagai aspek kebijakan seperti kurikulum, metode pengajaran, pendanaan, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan (William N., 2003). Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan mencapai tujuan strategisnya, baik itu peningkatan hasil

belajar, pemerataan akses pendidikan, atau peningkatan kualitas tenaga pendidik. Proses evaluasi juga melibatkan pengumpulan masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, serta elemen-elemen administratif dan kebijakan lainnya (Stewart, Jr, J., Hedge, D., & Lester, J. P. 2007).

Selain itu, evaluasi kebijakan pendidikan dasar juga mempertimbangkan aspek kontekstual yang kompleks seperti perbedaan regional, sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi implementasi dan hasil kebijakan. Tantangan utama dalam melakukan evaluasi ini adalah memastikan keakuratan data yang digunakan, memperhitungkan dinamika yang berubah dengan cepat dalam sistem pendidikan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan (Wirawan, 2011). Dengan demikian, analisis evaluasi kebijakan pendidikan dasar bukan hanya sekedar pemetaan hasil kebijakan yang telah diterapkan, tetapi juga merupakan landasan untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di masa depan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka. Penelitian kajian pustaka adalah hasil analisa berbagai informasi konseptual serta data-data kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian (review of research) (Mulyadi, 2012). Pada penelitian kajian pustaka ini yang digunakan adalah buku, Peraturan Pemerintah, dan jurnal nasional yang telah diringkas dan dianalisa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi adalah proses akhir dari suatu proses kebijakan, adalah penilaian tentang apa yang sudah terjadi selaku dampak pilihan serta penerapan kebijakan, serta jika dinilai perlu, bisa diperlukan perubahan terhadap kebijakan yang sudah diterapkan. Evaluasi kebijakan pendidikan pada hakikatnya adalah alat guna menghimpun serta mengelola informasi tentang program atau pelayanan yang diterapkan. Kebijakan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, negara bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berakar

pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntutan perubahan zaman (Stufflebeam, 1985). Umumnya suasana dan proses pembelajaran, apapun kurikulumnya, masih mengutamakan proses mendengar, mencatat dan menghafal (rote learning), belum sampai kepada proses pembelajaran yang diharapkan United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), yang terkenal dengan empat pilar belajar, yakni “learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be.” Sistem Pendidikan Nasional adalah “sebuah sistem yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional” (Daulay, 2004). Upaya “meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah, ini berarti pemunculan kebijakan itu harus dilandaskan pada orientasi tujuan yang kuat” (Sholeh, 2005). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan tidak hanya berbentuk undang-undang saja. Kebijakan pendidikan dasar merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu (Purnama, 2010).

Evaluasi kebijakan pendidikan berarti mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dasar yang berupa regulasi pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, maupun segala hal yang dijalankan oleh pemerintah berkaitan dengan pendidikan dasar sehingga menemukan gambaran yang jelas apa, mengapa, serta bagaimana sesungguhnya kondisi pendidikan yang ada. Hasil dan pembahasan dari evaluasi kebijakan pendidikan dasar menyoroti berbagai aspek yang kompleks dan penting dalam mengevaluasi dampak kebijakan terhadap sistem pendidikan suatu negara. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data yang mendalam, analisis yang komprehensif, serta pembahasan yang mendetail untuk memahami secara menyeluruh pencapaian, tantangan, dan implikasi kebijakan. Pertama-tama, hasil dari evaluasi kebijakan pendidikan dasar sering kali mencerminkan capaian yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Misalnya, kebijakan yang berhasil menerapkan program bantuan biaya pendidikan atau mengembangkan infrastruktur pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan partisipasi dan retensi siswa di sekolah. Data menunjukkan bahwa tingkat kelulusan sekolah dasar dan menengah meningkat secara

signifikan di berbagai wilayah yang menerapkan kebijakan tersebut. Selain itu, evaluasi juga mengungkapkan perbaikan dalam kualitas pembelajaran (Stufflebeam, 1985). Hal ini dapat terlihat dari peningkatan nilai tes akademik, kemampuan literasi, dan numerasi siswa. Kebijakan yang fokus pada pengembangan kurikulum yang relevan dan strategi pengajaran yang inovatif sering kali menghasilkan hasil yang lebih baik dalam hal pencapaian akademik siswa.

Menjalankan banyak macam model evaluasi kebijakan pendidikan dasar diatas, maka terdapat sejumlah pendekatan yang dapat dipakai yaitu: a. evaluasi formal, merupakan pendekatan yang dapat dipakai dalam kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan dengan memakai metode deskriptif agar menciptakan informasi yang valid serta terpercaya terkait hasil dari kebijakan berlandaskan target program kebijakan yang sudah diterapkan secara formal oleh penyusun kebijakan pendidikan tersebut. Dalam asumsinya yaitu dengan sasaran serta target yang telah ditentukan secara formal adalah parameter yang pas guna melihat nilai serta manfaat dari semua program serta juga kebijakan pendidikan. b. evaluasi keputusan teoritis, yang mana pendekatan ini suatu evaluasi kebijakan pendidikan dasar yang memakai metode deskriptif supaya membuahkan mengenai informasi pendidikan yang bisa dipercaya juga valid berkenaan hasil dari kebijakan pendidikan dasar yang dengan tersembunyi diharapkan oleh sejumlah pemangku kepentingan pendidikan. Oleh sebab itu, keputusan evaluasi teoritik pasti berupaya agar menetapkan sasaran juga tujuan yang tersirat atau dinyatakan oleh para stakeholder pendidikan. c. evaluasi semu, bisa dinyatakan dalam mengadakan evaluasi kebijakan pendidikan bisa memakai metode deskriptif guna membuahkan informasi yang terpercaya serta valid terkait hasil kebijakan yang ada pada bidang pendidikan, tanpa bersusah payah menanyakan nilai atau manfaat akan hasil kebijakan pendidikan dalam setiap orang, kelompok dan masyarakat. Dengan asumsi yang dipakai yaitu tentang ukuran nilai dan manfaat adalah sesuatu yang telah terbukti secara otomatis dan tidak kontroversial (William N Dunn, 2003: 612-634).

Keterlibatan pembuat dan pelaksana dalam evaluasi kebijakan ini bergantung kepada corak hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Pada hubungan yang bersifat teknokratika, kewenangan pembuat kebijakan sangat besar dan bahkan hampir-hampir mutlak, evaluasi yang dilakukan oleh pembuat harus diterima oleh pelaksana. Sebaliknya, pada hubungan yang bersifat swasta birokratis, keterlibatan pembuat kebijakan sangat kecil, karena sebagian besar kewenangan evaluasi ini ada pada

pelaksana. Bahkan hak kontrol atas pelaksanaan kebijakan ini sangat banyak ditentukan oleh pelaksana. Keterlibatan administrator dalam evaluasi kebijakan, umumnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan (Ali, 2007). Pertanggungjawaban hasil evaluasi kebijakan secara formal dan legal ada di tangan pelaksana meskipun secara materil berada di tangan administrator. Baik keterlibatan pembuat, pelaksana maupun administrator dalam evaluasi kebijakan umumnya berada di dalam arena. Jika mereka memberikan penilaian di luar arena, umumnya berkapasitas sebagai pribadi, atau pemberian penilaian yang bersifat tidak formal. Sementara itu keterlibatan aktor-aktor kebijakan yang bersifat tidak formal umumnya berada di luar arena. Sebab, jika memang mereka bermaksud memberikan penilaian secara formal melalui arena, haruslah menjadi aktor kebijakan formal (Yuyan, 2006). Media massa sering kali menjadi mediator dalam penilaian yang dilakukan oleh peserta-peserta kebijakan tidak formal ini. Dengan demikian, hasil penilaian tersebut akhirnya juga sampai kepada pelaksana, entah lambat atau cepat. Dalam proses penilaian, tidak jarang antara aktor-aktor formal dan aktor non formal tersebut bekerja sama atau membentuk suatu forum. Forum tersebut sengaja dibentuk dan dibuat dalam rangka memberikan penilaian menyeluruh terhadap kebijakan. Dengan adanya forum, akan didapatkan hasil penilaian yang berasal dari banyak variasi pandangan sehingga didapatkan hasil penilaian yang lebih komprehensif. Yang termasuk aktor-aktor non formal evaluasi kebijakan adalah: partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan dan media massa (Depdiknas, 1998).

Banyak problema yang dialami dalam aktivitas mengevaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan dasar. Problema-problema tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bila tujuan kebijakan tersebut tidak jelas. Ketidakjelasan tujuan demikian diakibatkan oleh adanya kompromi dan konsensus yang dipaksakan pada saat formulasi kebijakan. Kompromi dan konsensus demikian dipaksakan karena memang dimaksudkan untuk mengakomodasi banyaknya kepentingan yang ada di dalamnya. Tanpa adanya kompromi-kompromi, bisa mejadi penyebab formulasi kebijakan tersebut tidak disetujui oleh kebanyakan peserta kebijakan. Dan, jika tidak disetujui berarti tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu, tujuan yang dirumuskan umumnya kabur dan bisa bermakana ganda. Padahal gandanya makna justru menyulitkan evaluasinya.



2. Cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Ini menyulitkan evaluasi kebijakan, oleh karena itu masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh kebijakan mungkin juga sudah berubah dan berganti dengan masalah yang lainnya. Masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh formulasi dan implementasi kebijakan sudah tidak ada, sementara masalah baru yang bahkan tidak ada kaitannya dengan masalah lama muncul.
3. Tidak jelas masalahnya, sumber masalah dan gejala masalahnya. Ketidakjelasan demikian bisa terjadi karena antara masalah, sumber masalah, dan gejala masalah sudah tumpang tindih. Hal ini terjadi karena masalah-masalah tersebut golongan masalah sosial, antara yang satu dengan yang lain kadang-kadang saling interchange.
4. Terkaitnya antara masalah satu dengan masalah lain. Sebagai contoh: sukar memisahkan antara masalah kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Sebab masyarakat yang bodoh dan terbelakang cenderung miskin, dan sebaliknya pada masyarakat yang miskin juga cenderung bodoh dan terbelakang.
5. Subjektifnya masalah kebijakan. Ini dapat diketahui dari berbedanya masalah menurut persepsi orang satu dengan menurut persepsi orang lain. Bahkan sesuatu yang oleh seseorang dianggap sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan, justru dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan dan oleh karena itu harus dipertahankan.

Selain itu ditemukan juga problem-problem dalam melakukan evaluasi itu diantaranya (Nasihi, 2022):

1. Kebijakan publik kadang tidak memiliki tujuan yang jelas, yang diakibatkan dari pertimbangan politis. Ketidakjelasan tujuan meliputi: (1) tujuan yang tidak mungkin dicapai; (2) tujuan yang kontradiktif; (3) tujuan yang terlalu sempit atau terlalu spesifik; dan (4) tujuan antara atau tujuan sementara.
2. Pengukuran (measurement), menyangkut pada penggunaan konsep tertentu sebagai suatu alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program. Misalnya persoalan efisiensi: perbandingan cost - benefit atau input – output, sangat sulit untuk mengukur cost maupun benefit khususnya untuk persoalan sosial. Contoh lain persoalan efektivitas: sulit dilihat khususnya yang menyangkut kualitasnya.
3. Kelompok sasaran (target groups), yang perlu diperhatikan adalah program meskipun berdampak pada keseluruhan populasi sasaran, tetapi belum tentu memiliki dampak terhadap kelompok sasaran. Seringkali terjadi justru bukan



kelompok sasaran yang memperoleh manfaat program tetapi kelompok lain dalam populasi tersebut, yang kadang disebabkan bias birokrasi.

4. Sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Seorang analis kebijakan terkadang sulit untuk menterjemahkan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Padahal pertimbangan sistem nilai tidak dapat diabaikan dalam melakukan evaluasi kebijakan

Namun demikian, evaluasi juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Misalnya, ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan antar wilayah sering kali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mungkin mengalami kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan guru yang berkualifikasi tinggi atau dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda juga bisa menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Pembahasan evaluasi tidak hanya fokus pada pencapaian dan tantangan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab serta implikasi dari kebijakan yang diterapkan (Ali, 2020). Misalnya, kebijakan yang berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan sering kali didukung oleh investasi yang tepat dalam pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja, dan partisipasi aktif dari komunitas lokal dan orang tua siswa. Evaluasi dari dampak kebijakan pendidikan dapat diadakan secara dengan jika program serta proses dari evaluasi kebijakan pendidikan yang sudah dijalankan dengan lengkap serta berjalan pada waktu sesuai terhadap apa yang direncanakan. Kebijakan pendidikan mampu diketahui dampak jika telah diterapkan pada masyarakat dan pada objeknya (Irfan. 2003). Dari semua proses-proses evaluasi kebijakan pendidikan kita dapat mengetahui dampak dari kebijakan pendidikan yang tidak sama terhadap evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan dari evaluasi kebijakan pendidikan dasar memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan yang lebih baik di masa depan, dengan tujuan akhir meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi semua anak-anak dan generasi mendatang.

## KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan pendidikan dasar adalah bahwa kebijakan tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat berhasil meningkatkan tingkat kelulusan, meningkatkan pencapaian akademik siswa, serta memperbaiki kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia pendidikan.

Namun, kesimpulan juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu diatasi. Masalah ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan antar wilayah, kesenjangan sosial ekonomi dalam akses pendidikan, dan keterbatasan sumber daya tetap menjadi hambatan yang signifikan. Evaluasi menggarisbawahi perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya, mengembangkan kurikulum yang relevan, serta memperkuat dukungan terhadap tenaga pendidik.

Dalam Konteks ini, rekomendasi dari evaluasi menjadi kunci untuk perbaikan berkelanjutan. Penting untuk mengintegrasikan temuan evaluasi ke dalam perumusan kebijakan baru atau penyesuaian kebijakan yang ada. Dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah, Masyarakat dan stakeholder terkait diperlukan untuk mengimplementasikan rekomendasi tersebut secara efektif.

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan pendidikan dasar memberikan pandangan yang komprehensif tentang pencapaian, tantangan, dan implikasi kebijakan terhadap sistem pendidikan. Dengan memanfaatkan temuan evaluasi dengan bijak, diharapkan dapat tercipta sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan mampu menjawab tuntutan zaman untuk generasi yang lebih baik di masa depan.

## REFERENSI

- Achmad Nasih. 2022. Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning*. Vol. 1, No. 1.
- Ali, M. 2007. Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Depdiknas, 1998. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pembelajaran, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Dunn, William N., 2003. Analisa Kebijakan Publik. (Peny: Muhadjir Darwin). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hogwood, B. W., & Peters, B. G. 1985. The Pathology of public policy. USA: Oxford University Press
- Islamy, Irfan M. 2003. Prinsi-prinsip perumusan kebijakan negara, Jakarta: Penerbit bumi aksara.

- Imron, Ali. 2012. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia (Proses, Produk, dan Masa Depan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shi, Yuyan. 2006. *Selecting Evaluation Criteria and Evaluating Policy*, San Diego: University of California.
- Stewart, Jr, J., Hedge, D., & Lester, J. P. 2007. *Publik Policy: An Evolutionary Approach*. Nelson Education.
- Stufflebeam, 1985. *Systematic Evaluation*, Boston: Kluwer Nijhof Publishing.
- Supandi, Ahmad Sanusi. 1988. *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*, Jakarta: P2LPTK
- Wirawan, 2011. *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi)*. Jakarta: Rajawali Pers